

## MANAJEMEN RISIKO BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PENGARUHNYA TERHADAP *NON PERFORMING LOAN* (STUDY KASUS BPR DI KOTA TANGERANG SELATAN)

Rudi \*)

email : hr\_rudy@yahoo.com

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Manajemen Risiko pada Bank Perkreditan Rakyat dan Pengaruhnya terhadap *Non Performing Loan (NPL)* pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Tangerang Selatan. Metode penelitian yang digunakan berupa kuesioner yang diebarkan pada karyawan-karyawan BPR di Kota Tangerang Selatan, serta data laporan keuangan BPR untuk 5(lima) tahun terakhir yang diperoleh melalui website bi.go.id. Responden penelitian adalah para karyawan BPR, dimana 1 (satu) orang mewakili 1 (satu) BPR, dari 40 BPR yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Hasil penelitian: (1) Secara parsial kualitas analisis kredit ( $X_{KAK}$ ) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $0,229 < 2,021$ ) dan nilai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar  $0,820 > 0,05$ ; (2) Secara parsial pembatasan kewenangan pemutus kredit ( $X_{PKPK}$ ) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ). Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji parsial bahwa nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,851 > 2,021$ ) dan nilai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar  $0,007 < 0,05$ ; (3) Secara parsial pembatasan status agunan ( $X_{SA}$ ) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $2,095 > 2,021$ ) dan nilai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar  $0,043 < 0,05$ ; (4) dengan regresi ganda diperoleh bahwa kualitas analisis kredit ( $X_{KAK}$ ), pembatasan kewenangan pemutus kredit ( $X_{PKPK}$ ), dan fluktuasi status agunan ( $X_{SA}$ ) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) dengan nilai  $F_{hitung}$  ( $6,652$ )  $>$  dari  $F_{tabel}$  ( $2,840$ ) dan nilai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar ( $\alpha$ )  $0,001 < 0,05$ . Nilai koefisien korelasi sebesar  $0,597$  menunjukkan bahwa tingkat korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat tergolong kuat dengan kontribusi diberikan sebesar  $35,7\%$ .

**Kata Kunci:** Kualitas Analisis, Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit, Status Agunan dan *Non Performing Loan (NPL)*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the application of Risk Management in Rural Banks and Its Effect on Non-Performing Loans ( NPLs ) in the Rural Bank in South Tangerang City . The method used in the form of a questionnaire and financial statement data RBs to 5 ( five ) years obtained through the website bi.go.id. The respondents were employees of BPR , where 1 ( one ) person representing 1 ( one ) RB , from RB 40 in the city of South Tangerang.*

*Results of the study: (1) Partially quality credit analysis ( $X_{KAK}$ ) had no significant effect on the NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) with  $t_{count} < t_{table}$  ( $0.229 < 2.021$ ) and the value of the significance level ( $\alpha$ ) of  $0.820 > 0.05$ ; (2) The partial restriction of credit breaker authority ( $X_{PKPK}$ ) have a significant influence on the value of the NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ). This is shown by the results of the partial test that  $t_{count} < t_{table}$  ( $2.851 > 2.021$ ) and the value of the significance level ( $\alpha$ ) of  $0.007 < 0.05$ ; (3) The partial restriction collateral status ( $X_{SA}$ ) have a significant influence on the value of the NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) with  $t_{count} < t_{table}$  ( $2.095 > 2.021$ ) and the value of the significance level ( $\alpha$ ) of  $0.043 < 0.05$ ; (4) with multiple regression analysis showed that the quality of credit ( $X_{KAK}$ ), restrictions on the authority of credit breaker ( $X_{PKPK}$ ), and fluctuations in the collateral status ( $X_{SA}$ ) simultaneously have a significant influence on the NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ) with the value of  $F$  ( $6.652$ )  $>$  from  $F$  table ( $2,840$ ) and the value of the significance level ( $\alpha$ ) of ( $\alpha$ )  $0.001 < 0.05$ . Correlation coefficient of  $0.597$  indicates that the degree of correlation of independent variables on the dependent variable given the relatively strong with a contribution of  $35.7\%$ .*

**Keywords :** Quality Analysis , Restriction Credit Approval Authority , Collateral Status and Non - Performing Loans ( NPLs )

## A. Pendahuluan.

Salah satu langkah penting yang diambil BI dalam rangka memperkuat infrastruktur dan sistem pengelolaan perbankan adalah dengan mengupayakan penerapan *Risk Management dan Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan realisasi penerapan manajemen risiko pada operasional bank. Pada pelaksanaannya, GCG harus memenuhi prinsip-prinsip dasarnya yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibility, independensi dan fairness. Ali (2006) menyatakan bahwa GCG merupakan jurus pamungkas bagi penerapan regulasi perbankan. GCG harus menjadi bagian dari strategi operasional bank. Selain itu, BI mengubah pendekatan pengawasan bank, dari yang semula lebih berorientasi pada aspek *compliance* menjadi lebih berorientasi pada risiko (*risk based supervision*). Sedangkan untuk pelaksanaan manajemen risiko sendiri harus melakukan identifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Disamping itu, terkait dengan perkembangan konglomerasi di Indonesia yang berdasarkan pengalaman di waktu krisis dapat mempengaruhi kondisi perekonomian secara *systemic*, BI juga melakukan kajian atas kemungkinan penerapan pendekatan pengawasan secara terkonsolidasi (*consolidated supervision*).

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR. Sebagai bagian dari struktur perbankan nasional, BPR juga wajib menerapkan *Risk Management dan Good Corporate Governance* dalam kegiatan operasionalnya dengan pengawasan langsung dari BI (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).

Saat ini telah terjadi persaingan antar bank yang sangat ketat, baik sesama BPR maupun dengan bank umum. Terlebih lagi ketika Bank Indonesia menetapkan bahwa 20% kredit bank umum harus disalurkan ke sektor mikro yang merupakan segmentasi pasar BPR. Selain itu, tuntutan nasabah, perkembangan teknologi informasi serta deregulasi perbankan semakin memperkuat kondisi persaingan yang ada. Perbankan dituntut untuk terus melakukan inovasi terhadap produk dan jasanya. Perkembangan produk dan jasa perbankan yang cepat dan kompleks mendorong peningkatan risiko kegiatan usaha bank. Dengan demikian pengelolaan risiko operasional bank menjadi sangat penting, mengingat bank tidak saja mengelola modal dari pemiliknya, namun juga harus mengelola dana masyarakat.

Fungsi utama bank adalah sebagai intermediasor antara masyarakat pemilik dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana. Demikian juga dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan demikian fungsi BPR tidak hanya sekedar menerima simpanan dari masyarakat, tetapi juga menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat baik Bank Umum maupun BPR, menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat

Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat ( pada BPR ), persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan nasabah. Pemberian kredit dilakukan penuh dengan risiko, karena terdapat kemungkinan bahwa usaha yang dibiayai bank bisa mengalami kegagalan. Kegagalan usaha yang di biayai bank memiliki dampak terhadap kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang diberikan beserta seluruh atributnya. Risiko kegagalan pengembalian kredit akan mempengaruhi kontinuitas usaha bank serta kebangkrutan sebuah bank, yang pada akhirnya akan berdampak pada perkenomomian secara keseluruhan.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 kredit yang diberikan bank dibagi menjadi dua golongan yakni, *Performing Loan* (PL) yaitu debitur yang mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya dan tidak mempunyai potensi untuk mengalami kesulitan dalam pembayaran kewajibannya, dan *Non Performing Loan* (NPL) yaitu kredit bermasalah yang debiturnya berpotensi mengalami kesulitan pembayaran terhadap segala kewajibannya, baik kewajiban pembayaran pokok, bunga, propisi dan biaya administrasi yang menjadi bebannya sesuai ketentuan yang termaktub dalam perjanjian kreditnya.

NPL merupakan sebuah masalah yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sebuah bank. Tingginya tingkat NPL suatu bank lambat laun akan menghancurkan bank tersebut. Banyak perbankan swasta nasional yang dilikuidasi pada tahun 1998/1999 juga di dasari oleh tingginya tingkat NPL bank-bank tersebut sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada saat itu. Sehingga pemerintah saat ikut berperan dalam menyehatkan perbankan dengan membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan rata-rata NPL BPR secara nasional yang dikutip dari website Bank Indonesia dan data Otoritas Jasa Keuangan ( OJK), berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia Vol.12, No. 08 bulan Juli 2014 dari tahun 2009-2013, secara umum trend NPL BPR terus membaik dari tahun ke tahun. Rata-rata NPL nasional pernah mengalami titik tertinggi pada tahun 2009, yaitu sebesar 6,90%. NPL BPR nasional terus membaik sehingga pada tahun 2013 rata-rata NPL nasional menjadi 4,41%. Akan tetapi berdasarkan data statistik tersebut, sepanjang tahun 2014 ( data bulan Januari sampai dengan bulan Juli ) terjadi kenaikan NPL, dimana rata-rata NPL nasional masih diatas ambang batas yang ditolerir Bank Indonesia, yakni masih diatas 5%.

Kebijakan perkreditan BPR mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu untuk digunakan sebagai panduan dan pedoman dalam pelaksanaan semua kegiatan yang berkaitan dengan perkreditan yang sehat dan menguntungkan. Dengan adanya Kebijakan Perkreditan BPR diharapkan seluruh pejabat/karyawan yang terkait dengan perkreditan dapat menerapkan asas-asas perkreditan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan.

Penerapan Manajemen Risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan *shareholder value*, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank.

## B. Perumusan Masalah

Berpangkal dari latar belakang masalah seperti yang telah diuraikan diatas bahwa perlu diterapkan suatu manajemen risiko terhadap operasional Bank Perkreditan Rakyat, terutama dalam hal pelaksanaan pemberian kredit, dimulai dari awal pemerosesan, kelengkapan data, analisa data, keputusan pemberian kredit, status agunan dan pengikatannya, keberadaan bagian Legal serta Satuan Pengawas Internal. Hal ini harus dilakukan agar Bank tidak mengalami kerugian sebagai akibat tingginya *Non Performing Loan ( NPL)*. Oleh karena itu dapat dirumuskan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kualitas analisis kredit yang mencakup kelengkapan data aplikasi, dan proses survei terhadap rasio NPL?
2. Bagaimana pengaruh pembatasan kewenangan pemutus kredit; mencakup pengaruh pemisahan wewenang fungsi marketing, surveyor, dan Account Officer, wewenang pemutus kredit dan keberadaan Komite Kredit terhadap NPL BPR?
3. Bagaimana pengaruh status agunan mencakup tentang keberadaan bagian Legal, serta Satuan Pengawas Internal terhadap NPL BPR?
4. Bagaimana pengaruh kualitas analisis kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan, secara bersama-sama terhadap NPL BPR?

## C. Tujuan Penelitian

**Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:**

1. Menguji pengaruh penerapan manajemen resiko kredit, kaitannya dengan kualitas analisis kredit yang mencakup kelengkapan data aplikasi, dan proses survei terhadap rasio NPL
2. Untuk mengetahui pengaruh pembatasan kewenangan pemutus kredit; mencakup pengaruh pemisahan wewenang fungsi marketing, surveyor, dan Account Officer, wewenang pemutus kredit dan keberadaan Komite Kredit terhadap NPL BPR .
3. Untuk mengetahui pengaruh status agunan mencakup tentang keberadaan bagian Legal, serta Satuan Pengawas Internal terhadap NPL BPR.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas analisis kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan, secara bersama-sama terhadap NPL BPR.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi bagi ilmu ekonomi, khususnya mengenai manajemen risiko kredit pada lembaga keuangan mikro, berupa model pengujian pengaruh penerapan manajemen risiko kredit terhadap tingkat kegagalan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
2. Memberikan informasi bagi BPR mengenai penerapan manajemen risiko kredit yang tepat pada tataran operasional sehingga dapat menekan tingkat kegagalan kredit pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
3. Sebagai masukan bagi Perbankan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menentukan kebijakan yang lebih tepat terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit khususnya pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

#### D. Landasan Teori

Menurut Smit,1990, manajemen risiko didefinisikan sebagai proses identifikasi, pengukuran dan control keuangan dari sebuah risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Tindakan manajemen resiko diambil oleh para praktisi untuk merespon bermacam-macam resiko. Responden melakukan dua macam tindakan manajemen resiko yaitu mencegah dan memperbaiki. Tindakan mencegah digunakan untuk mengurangi, menghindari, atau mentransfer resiko pada tahap awal proyek konstruksi. Sedangkan tindakan memperbaiki adalah untuk mengurangi efek-efek ketika resiko terjadi atau ketika resiko harus diambil. Manajemen resiko adalah sebuah cara yang sistematis dalam memandang sebuah resiko dan menentukan dengan tepat penanganan resiko tersebut. Ini merupakan sebuah sarana untuk mengidentifikasi sumber dari resiko dan ketidakpastian, dan memperkirakan dampak yang ditimbulkan dan mengembangkan respon yang harus

Salah satu resiko yang dihadapi oleh bank adalah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan kepada debitur atau disebut dengan resiko kredit. Menurut Dahlan Siamat (2004:92) resiko kredit merupakan : “suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan atau dijadwalkan.” Resiko kredit di dalamnya termasuk *non performing loan*. *Non performing loan* (NPL) adalah kredit yang bermasalah dimana debitur tidak dapat memenuhi pembayaran tunggakan peminjaman dan bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Yang termasuk ke dalam *non performing loan* adalah kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan rumus :

$$NPL = \frac{NPL = \text{kurang lancar} + \text{diragukan} + \text{macet}}{\text{Total kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

Peningkatan NPL dalam jumlah yang banyak dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan bank, oleh karena itu bank dituntut untuk selalu menjaga kredit tidak dalam posisi NPL yang tinggi. Agar dapat menentukan tingkat wajar atau sehat maka ditentukan ukuran standar yang tepat untuk NPL. Dalam hal ini Bank Indonesia menetapkan bahwa tingkat NPL yang wajar adalah  $\leq 5\%$  dari total portofolio kreditnya.

#### E. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif, dimana data-data yang didapat dari berbagai sumber dari BPR-BPR yang diteliti dan data yang diperoleh melalui website bi.go.id, diolah dan diteliti melalui uji hipotesis terhadap variable-variabel yang diteliti, yang kemudian menghasilkan data dari hasil uji hipotesis tersebut berupa gambaran terhadap hasil yang diperoleh, baik secara parsial maupun secara bersama-sama.

### 1. Populasi Dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah BPR di wilayah Tangerang Selatan dan BPR yang berdekatan dengan kota Tangerang selatan. Jumlah BPR yang diteliti sebanyak 40 BPR.. Menurut Rosce dalam Umar Husein, 2008, satu variable rentang responden adalah 10 – 50, jadi kalau minimal 10 maka 4(empat) variabel menjadi 40 responden ( sehingga setiap BPR satu responden).

### 2. Sumber Dan cara Pengumpulan Data

Terkait dengan penerapan manajemen risiko kredit, data yang dibutuhkan adalah data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui kuisisioner, sedangkan data skunder diperoleh melalui website BI yakni [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Kuisisioner tersebut berisi pertanyaan mengenai bagaimana penerapan manajemen risiko kredit di BPR terkait dengan aspek-aspek sebagai berikut;

1. Aspek Analisis Kredit, meliputi: kelengkapan data aplikasi kredit, kelengkapan dokumen survey dan wawancara, dan kualitas analisis kredit,
2. Aspek Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit, meliputi: kelengkapan komite kredit, pemisahan wewenang fungsi, dan pembatasan wewenang.
3. Aspek Status Agunan, meliputi: keberadaan bagian legal, status agunan, dan Satuan Pengawas Internal.

Kuisisioner diisi oleh Direktur/Manajer/Kepala bagian kredit dari BPR yang menjadi sample penelitian. Kunjungan dan obeservasi ke BPR dilakukan untuk menyebarkan kuisisioner. Diskusi mengenai maksud penelitian dan cara pengisian kuisisioner juga dilakukan untuk memastikan bahwa kuisisioner diisi dengan benar. Sementara itu, untuk data NPL BPR yang diteliti diperoleh melalui website BI dengan alamat [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

### 3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menguji pengaruh penerapan manajemen risiko pada operasional pemberian kredit BPR terhadap tingkat kegagalan kredit BPR. Penerapan manajemen risiko kredit diproksikan melalui Kualitas Analisa Kredit yang meliputi kelengkapan data aplikasi kredit, kelengkapan dokumen survey dan wawancara, dan kualitas analisis kredit.

Untuk melakukan analisis terhadap model ekonometrik di atas, dibutuhkan alat analisis yang dapat menguji seberapa besar pengaruh variable terikat NPL dapat dijelaskan oleh variable bebas kualitas analisa kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan. Sugiyanto (2006) menyatakan bahwa untuk menguji pengaruh sejumlah variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dapat digunakan alat uji Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Linear Regression Analysis). Namun, dalam penelitian ini, kategori variabel terikat dan variabel bebas adalah ordinal. Dengan demikian alat analisis yang digunakan adalah Ordinal Regression atau Polytomous Universal Model (Ghozali, 2006). Maka model ekonometrik penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{\text{Prob}(\text{event})}{1 - \text{Prob}(\text{event})}\right) = \alpha + \beta_1 X_{KAK} + \beta_2 X_{PKPK} + \beta_3 X_{SA}$$

## F. Hasil dan Pembahasan

### 1) Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Pengujian validitas dan reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan yang ada dalam sebuah kuesioner, apakah isi dari butir-butir pertanyaan yang ada dalam sudah valid dan reliabel. Jika butir-butir pertanyaan tersebut sudah valid dan reliabel berarti butir-butir pertanyaan tersebut sudah bisa untuk mengukur faktor-faktornya.

**Tabel Uji Validitas Instrumen Penelitian**

No	Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Ket. Butir
<b>Variabel Kualitas Analisa Kredit (<math>X_{KAK}</math>)</b>				
	KAK_1	0,720	0,320	Valid
	KAK_2	0,774	0,320	Valid
	KAK_3	0,815	0,320	Valid
	KAK_4	0,526	0,320	Valid
<b>Variabel Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit Variabel (<math>X_{PKPK}</math>)</b>				
	PKPK_1	0,517	0,320	Valid
	PKPK_2	0,620	0,320	Valid
	PKPK_3	0,622	0,320	Valid
<b>Variabel Status Agunan (<math>X_{SA}</math>)</b>				
	SA_1	0,583	0,320	Valid
	SA_2	0,630	0,320	Valid
	SA_3	0,537	0,320	Valid

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari semua butir pernyataan dinyatakan valid, dimana semua item-item pernyataan memiliki nilai *corrected item total correlation* lebih besar dari 0,320 (Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

Hasil Uji reliabilitas instrumen variabel seperti ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel Uji Reliabilitas Instrumen Variabel Penelitian**

No	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items
1	Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ )	0,858	4
2	Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit Variabel ( $X_{PKPK}$ )	0,754	3
3	Status Agunan ( $X_{SA}$ )	0,752	3

Sumber: Hasil Olah Data SPSS

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh item-item pernyataan dalam variabel kualitas analisa kredit, variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6 yang merupakan nilai kritis r (Sunnyoto, 2010, :84) sehingga dapat dinyatakan bahwa item-item tersebut memiliki tingkat keandalan yang tinggi dalam mengukur variabel NPL.

### 2) Deskripsi Data Penelitian

#### a. Analisis Deskriptif Instrumen Variabel Penelitian

Analisis kategori data penelitian adalah analisis yang berkaitan langsung dengan data penelitian. Analisis ini bersumber dari angket yang peneliti sebarakan kepada

responden yang untuk mengukur variabel penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif dari variabel-variabel terkait. Deskripsi bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta sampel tertentu secara faktual dan cermat.

Dari hasil jawaban responden variabel-variabel terkait yaitu variabel Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ), variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ), dan Variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ ) dapat diketahui rata-rata skor pilihan jawaban responden. Adapun analisis interpretasi rata-rata skor menurut menurut Sofar Silaen dan Widiyono(2013: p.128), maka digunakan rumus:

$$CI = \frac{Range}{C}$$

dimana: CI = *class interval* (interval kelas)  
Range = skor tertinggi – skor terendah  
C = jumlah kelas / jumlah alternatif jawaban

Dengan demikian interval kelas skor =  $\frac{4-1}{4} = 0,75$  kemudian disusun tabel kriteria

interpretasi skor seperti pada Tabel berikut.

**Tabel Kriteria Interpretasi Skor**

No.	Interval Kelas	Keterangan
1	1,00 - 1,75	Pilihan Jawaban 1
2	1,76 - 2,50	Pilihan Jawaban 2
3	2,51 - 3,25	Pilihan Jawaban 3
4	3,26 - 4,00	Pilihan Jawaban 4

#### **Variabel Kualitas Angka Kredit ( $X_{KAK}$ )**

Variabel Kualitas Angka Kredit terdiri dari 4 (empat) item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban. Hasil analisis deskriptif kategori skor pilihan jawaban responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel kualitas angka kredit.

**Tabel Kategori Persepsi Responden  
Mengenai Variabel Kualitas Angka Kredit ( $X_{KAK}$ )**

No	Instrumen	Pilihan Jawaban Responden				Rata-rata Pilihan Jawaban
		1	2	3	4	
1	Kelengkapan pengisian data nasabah (KAK_1)	-	4	7	29	3.63
		0%	10%	18%	73%	
2	Kelengkapan berkas administrasi kredit (KAK_2)	-	6	10	24	3.45
		0%	15%	25%	60%	
3	Kelengkapan hasil survey (KAK_3)	-	8	7	25	3.43
		0%	20%	18%	63%	
4	Analisis permohonan kredit (KAK_4)	-	7	12	21	3.35
		0%	18%	30%	53%	

Sumber: Pengolahan data (2015)

Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel kualitas analisa kredit, dapat diketahui:



- 1) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan kelengkapan data nasabah (KAK\_1) diperoleh skor rata-rata 3,63 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item KAK\_1 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4, yaitu mengisi data pribadi, data pelunasan kredit, data jaminan, jumlah permohonan kredit dan jangka waktu kredit sebanyak 73%.
- 2) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan kelengkapan berkas administrasi kredit (KAK\_2) diperoleh skor rata-rata 3,45 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item KAK\_2 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4, yaitu berkas administrasi dilengkapi fotocopy KTP, kartu keluarga, buku nikah, pas fopy PBB/SPPT, rekening listrik, rekening telepon, slip gaji/surat keterangan penghasilan dan rekening tabungan yang dimiliki sebanyak 60%.
- 3) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan kelengkapan hasil survei (KAK\_3) diperoleh skor rata-rata 3,43 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item KAK\_3 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4 yaitu memilih hasil survey terdiri dari form hasil survey, form hasil wawancara, foto tempat tinggal nasabah berikut nasabahnya dan foto jaminan kredit sebanyak 63%.
- 4) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan analisis angka kredit (KAK\_4) diperoleh skor rata-rata 3,35 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item KAK\_4 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4 yaitu bahwa analisis sesuai dengan seluruh isian form data nasabah dan dilengkapi dengan bukti-bukti sebanyak 53%.

#### Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ )

Variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban. hasil analisis deskriptif kategori skor pilihan jawaban responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit.

**Tabel Kategori Persepsi Responden  
Mengenai Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ )**

No	Instrumen	Pilihan Jawaban Responden				Rata-rata Pilihan Jawaban
		1	2	3	4	
1	Pemisahan wewenang petugas untuk menjalankan fungsi marketing, survey dan analisis (PKPK_1)	-	3	18	19	3.40
		0%	8%	45%	48%	
2	Komite Kredit /Dewan Pemutus Kredit (PKPK_2)	-	6	18	16	3.25
		0%	15%	45%	40%	
3	Batas wewenang pemutus kredit (PKPK_3)	-	7	15	18	3.28
		0%	18%	38%	45%	

Sumber: Pengolahan data (2015)

Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit, dapat diketahui:

- 1) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan pemisahan wewenang petugas untuk menjalankan fungsi marketing, survey dan analisis (PKPK\_1) diperoleh skor rata-rata 3,40 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item PKPK\_1 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4, yaitu memilih tiga orang karyawan dengan pembagian tugas masing-masing fungsi marketing, survey dan analisis sebanyak 48%.
- 2) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan mengenai komite kredit /dewan pemutus kredit (PKPK\_2) diperoleh skor rata-rata 3,25 di rentang 3,01 – 3,25. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item PKPK\_2 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 3, yaitu jawaban Dewan Pemutus Kredit terdiri dari Komisaris, Direksi, Kabag Kredit, Kabag Operasional dan Analisis Kredit sebanyak 45%.
- 3) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan mengenai batas wewenang pemutus kredit (PKPK\_3) diperoleh skor rata-rata 3,28 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item PKPK\_3 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4 yaitu memilih batas wewenang pemutus kredit terdiri dari Komisaris, Direktur Utama, Direktur Operasional dan Kabag Kredit sebanyak 63%.

Dari hasil persepsi Responden tersebut, pilihan pada PKPK\_3 menjadi pilihan terbanyak, hal ini menunjukkan bahwa pemutus kredit di BPR yang paling ideal adalah seperti pada PKPK\_3

#### Variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ )

Variabel Status Agunan terdiri dari 3 (tiga) item pernyataan dengan 4 (empat) alternatif jawaban. hasil analisis deskriptif kategori skor pilihan jawaban responden terhadap 4 item pertanyaan pada variabel status agunan.

**Tabel Kategori Persepsi Responden  
Mengenai Variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ )**

No	Instrumen	Pilihan Jawaban Responden				Rata-rata Pilihan Jawaban
		1	2	3	4	
1	Status Agunan Kredit (SA_1)	1	9	7	23	3.30
		3%	23%	18%	58%	
2	Keberadaan bagian legal (SA_2)	-	12	12	16	3.10
		0%	30%	30%	40%	
3	Keberadaan satuan pengawas intern (SA_3)	-	7	13	20	3.33
		0%	18%	33%	50%	

Sumber: Pengolahan data (2015)

Dari Tabel di atas merupakan hasil persepsi 40 responden terhadap pernyataan pada variabel status agunan, dapat diketahui:

- 1) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan status agunan kredit (SA\_1) diperoleh skor rata-rata 3,30 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item SA\_1 secara

keseluruhan lebih memilih jawaban point 4, yaitu memilih jawaban transaksi agunan maksimal 70%, pengikatan agunan benda bergerak dengan fiducia dan agunan benda tidak bergerak dengan SKMHT dan hak tanggungan (APHT) sebanyak 58%.

- 2) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan mengenai keberadaan bagian legal (SA\_2) diperoleh skor rata-rata 3,10 di rentang 3,01 – 3,25. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item SA\_2 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 3, yaitu memilih bahwa perusahaan mempunyai bagian legal yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen aplikasi kredit, menerbitkan surat pengikatan kredit, menerbitkan surat pengakuan hutang, menerbitkan surat pengikatan agunan, mengetahui surat perjanjian kredit dan mendokumentasikan pembukuan kredit sebanyak 30%.
- 3) Rata-rata skor pilihan jawaban responden berkaitan pernyataan mengenai keberadaan satuan pengawas intern/SPI (SA\_3) diperoleh skor rata-rata 3,33 di rentang 3,26 – 4,00. Hal ini menunjukkan respon responden terhadap pernyataan item SA\_3 secara keseluruhan lebih memilih jawaban point 4 yaitu memilih jawaban perusahaan mempunyai SPI, dengan aktivitas pengawas secara rutin setiap hari sebanyak 50%.

### 3) Pengujian Persyaratan Analisis

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda maka diperlukan uji persyaratan analisis. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian asumsi klasik. Model regresi linear berganda dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut terbebas dari asumsi-asumsi statistik klasik. Ada tiga uji asumsi klasik yang harus dipenuhi sebelum analisis regresi linear berganda dapat dilakukan, yaitu: uji normalitas data, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Dalam melakukan pengujian asumsi klasik, penulis menggunakan bantuan *software* SPSS.

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dipergunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P-Plot dan uji *Kolmogorov-Smirnov*. Hasil pengujian diperoleh hasil sebagai berikut :

Hasil uji *Kolmogorov smirnov* seperti ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel Uji Kolmogorov-Smirnov**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Abs_Residu
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	3.9983
	Std. Deviation	4.29653
Most Extreme Differences	Absolute	.198
	Positive	.174
	Negative	-.198
Kolmogorov-Smirnov Z		1.250
Asymp. Sig. (2-tailed)		.088

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Pengolahan data (2015)

Dari hasil pengujian diperoleh angka sig. lebih besar dari 0.05 (>5%), dengan demikian sebaran data residual berdistribusi normal. Sehingga bisa dikatakan dalam hal ini data-data tersebut baik untuk dianalisis lebih lanjut.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas yaitu adanya hubungan linear antar variabel independen atau untuk memastikan variabel bebas yang satu tidak mempunyai hubungan yang kuat atau berkorelasi tinggi dengan variabel bebas yang lainnya dalam suatu model *multiple regression*.

Jika terjadi korelasi yang tinggi maka terdapat masalah multikolinieritas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Model regresi yang bebas multiko adalah mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka *Tolerance Value* mendekati 1. Bila dari hasil pengujian VIF diketahui ada variabel bebas yang memiliki nilai *Tolerance Value* kurang dari 0,10 dan atau nilai VIF-nya lebih tinggi dari 10, maka hal itu menunjukkan adanya indikasi masalah multikolinieritas pada model tersebut.

Hasil Uji Multikolinieritas variabel variabel kualitas analisa kredit, variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit, dan variabel status agunan terhadap NPL ditunjukkan dalam tabel berikut:

**Tabel Uji Multikolinieritas Variabel X terhadap Variabel Y**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	35.135	6.950		5.056	.000		
1 Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ )	.111	.486	.038	.229	.820	.647	1.545
Pembatasan Kewenangan ( $X_{PKPK}$ )	-1.999	.701	-.466	-2.851	.007	.669	1.495
Status Agunan ( $X_{SA}$ )	-1.083	.517	-.298	-2.095	.043	.882	1.134

Sumber: Pengolahan data (2015)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai VIF Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ) adalah 1,545, nilai VIF Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ) adalah 1,495, dan nilai VIF Status Agunan ( $X_{SA}$ ) adalah 1,134. Karena semua nilai VIF variabel X lebih kecil dari 10, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinieritas. Sedangkan pada nilai *tolerance* variabel Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ) adalah 0,645, nilai *tolerance* Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ) adalah 0,669, dan nilai *tolerance* Status Agunan ( $X_{SA}$ ) adalah 0,882. Karena semua *tolerance* variabel independen semuanya lebih kecil dari 1,0 sehingga tidak ada masalah multikolinieritas.

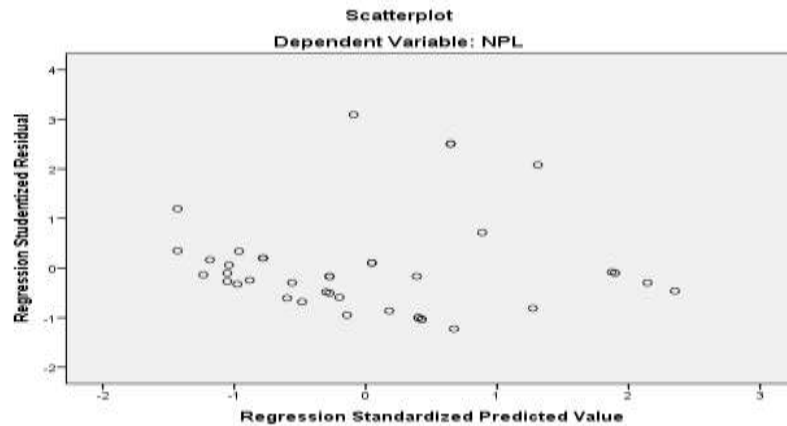
## 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang diajukan terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka diduga terdapat masalah Heteroskedastisitas.

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat pada grafik *Scatterplot* dimana keputusan pada grafik apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Namun jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.

**Grafik Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**



Gambar Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot  
Sumber: Hasil pengolahan data (2015)

Dari output di atas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi.

**4) Analisis Regresi Linier Berganda**

Untuk mengetahui prediksi perubahan nilai variabel dependen (Y) yang diakibatkan pengaruh beberapa variabel independen ( $X_1$ ,  $X_2$ , dan  $X_3$ ) digunakan analisis regresi linear berganda.

**Tabel Perhitungan Koefisien Regresi Berganda Pengaruh Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y) Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.135	6.950		5.056	.000
1 Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ )	.111	.486	.038	.229	.820
Pembatasan Kewenangan ( $X_{PKPK}$ )	-1.999	.701	-.466	-2.851	.007
Status Agunan ( $X_{SA}$ )	-1.083	.517	-.298	-2.095	.043

a. Dependent Variable: NPL

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel 4.12. diatas, diperoleh nilai  $\alpha = 35,135$ ,  $\beta_1 = 0,111$ ,  $\beta_2 = -1,999$ , dan  $\beta_3 = -1,083$ . Dengan demikian maka diperoleh persamaan regresi linier berganda  $Y_{NPL} = 35,135 + 0,111X_{KAK} - 1,999X_{PKPK} - 1,083X_{SA}$ . Persamaan di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Angka konstanta 35,135 menyatakan apabila nilai variabel  $X_{KAK}$ ,  $X_{PKPK}$  dan  $X_{SA}$  konstan (0) maka variabel  $NPL$  BPR sudah mempunyai nilai sebesar 35,135.

- 2) Koefisien regresi 0,111 pada variabel Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ) adalah bernilai positif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila variabel Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ) mengalami peningkatan, maka NPL BPR cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,111 kali atas setiap penambahan yang terjadi pada variabel Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ ).
- 3) Koefisien regresi -1,999 pada variabel , Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ) adalah bernilai negatif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ) ditingkatkan, maka NPL BPR cenderung mengalami penurunan sebesar 1,999 kali atas setiap peningkatan yang terjadi pada variabel Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit ( $X_{PKPK}$ ).
- 4) Koefisien regresi -1,083 pada variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ ) adalah bernilai negatif menyatakan bahwa dengan mengasumsikan ketiadaan variabel independen lainnya, maka apabila variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ ) ditingkatkan, maka NPL BPR cenderung mengalami penurunan sebesar 1,083 kali atas setiap peningkatan yang terjadi pada variabel Status Agunan ( $X_{SA}$ ).

## 5) Uji Hipotesis

### 1. Uji Parsial ( Uji t)

Pengujian statistik t bertujuan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam pengujian ini jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau signifikansi  $t_{hitung}$  (p-value)  $< \alpha$ , maka ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan secara statistik antara variabel independen tersebut terhadap variabel dependen.

Adapun hasil uji statistik pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen seperti ditunjukkan dalam Tabel erikut ini:

**Tabel Hasil Uji Statistik t**  
**Pengaruh Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Tetap (Y)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	35.135	6.950		5.056	.000
1 Kualitas Analisa Kredit (X1)	.111	.486	.038	.229	.820
Pembatasan Kewenangan (X2)	-1.999	.701	-.466	-	.007
Status Agunan (X3)	-1.083	.517	-.298	-	.043
				2.851	
				2.095	

a. Dependent Variable: NPL

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Berdasarkan Tabel diatas, hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini adalah :

### 1) Uji Hipotesis Pengaruh Kualitas Analisis Kredit terhadap NPL

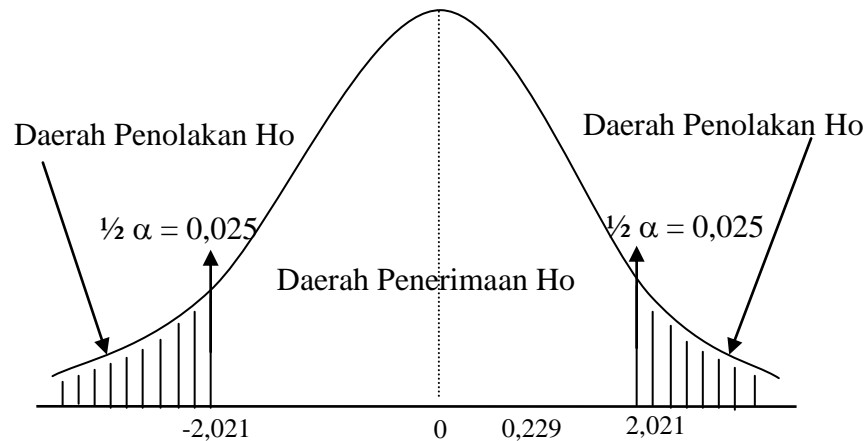
Hipotesis ( $H_1$ ) yang akan diuji pada bagian ini adalah :

$H_0$ :  $\rho = 0$  artinya variabel kualitas analisis kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

$H_1$ :  $\rho \neq 0$  artinya variabel kualitas analisis kredit berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

Dari tabel 5.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,229. Sedangkan nilai  $t_{tabel}$  untuk  $n=40$  dan  $dk = n-2 = 40-2 = 38$  pada taraf signifikansi  $\alpha = 0,05$  diperoleh  $t_{tabel} = 2,021$ . Karena nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  dan nilai taraf signifikansi ( $\alpha$ ) sebesar  $0,820 > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas analisis kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

**Kurva Normal Pengaruh Kualitas Analisis Kredit terhadap NPL BPR**

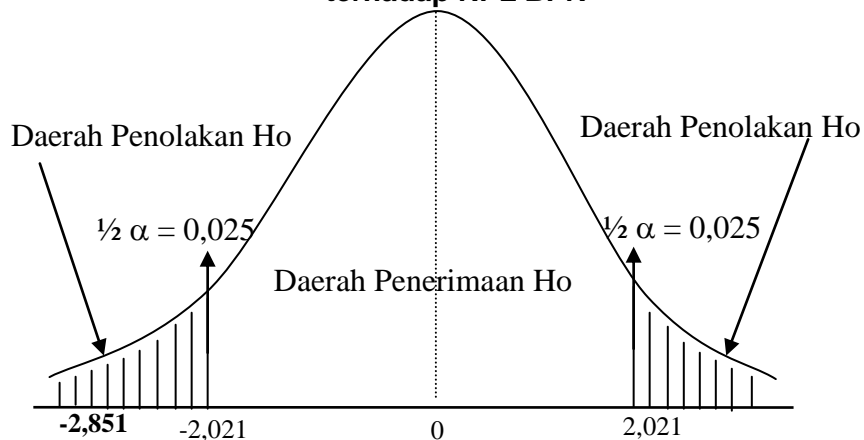


**Gambar Kurva Pengaruh Kualitas Analisa Kredit**

**2) Uji Hipotesis Pengaruh Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit terhadap NPL**

Dari tabel 5.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,851 < t_{tabel}$  ( $-2,021$ ) serta nilai taraf signifikansi sebesar  $0,007 < \alpha$  ( $0,05$ ). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa kewenangan pemutus kredit berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

**Kurva Normal Pengaruh Kewenangan Pemutus Kredit terhadap NPL BPR**



**Gambar Kurva Pengaruh Kewenangan Pemutus Kredit**

**3) Uji Hipotesis Pengaruh Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL**

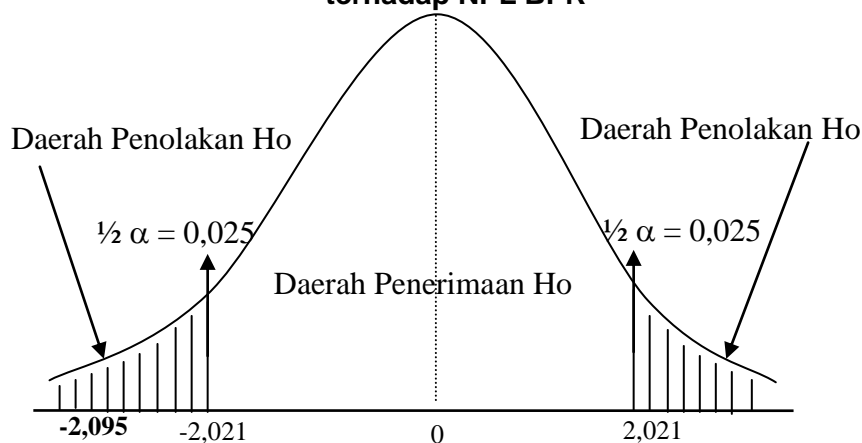
Hipotesis ( $H_3$ ) yang akan diuji pada bagian ini adalah :

$H_0$ :  $\rho = 0$  artinya variabel fluktuasi status agunan tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

$H_1$ :  $\rho \neq 0$  artinya variabel fluktuasi status agunan berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

Dari tabel 5.13, diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,095 < t_{tabel}$  (-2,021) serta nilai taraf signifikansi sebesar  $0,043 < \alpha$  (0,05). Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa variabel fluktuasi status agunan berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR.

**Kurva Normal Pengaruh Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL BPR**



**Gambar Pengaruh Fluktuasi Status Agunan**

**2. Uji F (Uji Simultan)**

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Uji Statistik F ini merupakan pengujian yang diperlukan dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

$H_0$  diterima apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau Signifikansi  $F_{hitung} > \alpha$

$H_0$  ditolak apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$  atau Signifikansi  $F_{hitung} < \alpha$

Hasil uji ini pada output SPSS pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel bebas (Y) dapat dilihat pada tabel ANOVA berikut ini:

**Tabel Uji Simultan**

**Pengaruh Kualitas Analisis Kredit, Pembatasan Kewenangan Pemutus Kredit, dan Fluktuasi Status Agunan terhadap NPL BPR**

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	753.580	3	251.193	6.652	.001 <sup>b</sup>
Residual	1359.395	36	37.761		
Total	2112.975	39			

a. Dependent Variable: NPL



b. Predictors: (Constant), Status Agunan ( $X_{SA}$ ), Pembatasan Kewenangan ( $X_{PKPK}$ ), Kualitas Analisa Kredit ( $X_{KAK}$ )

Dari Tabel diatas diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6,652 sedangkan untuk nilai  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) pembilang = k (banyak variabel bebas) = 3 dan dk penyebut =  $n-k-1 = 40 - 3 - 1 = 37$  diperoleh  $F_{tabel} = 2,840$ . Jika nilai  $F_{hitung}$  dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  maka akan terlihat bahwa  $F_{hitung} (6,652) >$  dari  $F_{tabel} (2,840)$  dengan tingkat signifikansi atau probabilitas ( $\alpha$ )  $0,001 < 0,05$  adalah signifikan. artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hal ini berarti kualitas analisis kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit, dan fluktuasi status agunan berpengaruh secara simultan terhadap NPL BPR

### 3. Analisis Korelasi

Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan arah korelasi yang terjadi maka dilakukan analisis korelasi. Dalam analisis korelasi ini yang dilakukan adalah menghitung besarnya koefisien korelasi dan menganalisisnya. Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai koefisien korelasi (R) seperti ditunjukkan pada Tabel berikut.

**Tabel Korelasi Nilai R dan R Square**  
Variabel Bebas (X) terhadap Variabel Terikat (Y)  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.597 <sup>a</sup>	.357	.303	6.145

a. Predictors: (Constant), Status Agunan (X3), Pembatasan Kewenangan (X2), Kualitas Analisa Kredit (X1)

b. Dependent Variable: NPL

Sumber: Data Primer Diolah (2015)

Koefisien korelasi (R) disebut juga sebagai koefisien korelasi berganda.

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R sebesar 0,597. Untuk mengetahui apakah kuat atau tidak korelasi variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan tabel koefisien korelasi seperti pada Tabel berikut.

**Tabel Interpretasi Koefisien Korelasi**

Range Nilai	Keterangan
0,00 - 0,25	Korelasi sangat lemah dianggap tidak ada
0,25 - 0,50	Korelasi cukup kuat
0,50 - 0,75	Korelasi kuat
0,75 -1,00	Korelasi sangat kuat

Sumber : Sarwono (2007)

Dari Tabel diatas terlihat jelas bahwa nilai R sebesar 0,597 terletak pada kisaran 0,50 – 0,75 maka korelasi antara variabel kualitas analisa kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit dan status agunan terhadap NPL BPR adalah kuat.

### 4. Analisis Determinasi

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan analisis determinasi. Berdasarkan Tabel 4.15 diperoleh angka  $R_{Square}$  atau koefisien determinan sebesar 0,357 yang berarti varian yang terjadi pada variabel *NPL BPR* adalah sebesar Koefisien Determinasi (KD)  $= R^2 = (0,597)^2 = 0,357 = 35,7\%$  dimana

varian NPL BPR tersebut ditentukan oleh kualitas analisis kredit, pembatasan kewenangan pemutus kredit, dan fluktuasi status agunan. Sedangkan sisanya sebesar  $100\% - 35,7\% = 64,3\%$  itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

### G. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Analisa Kredit tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Hasil pengolahan data diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $0,229 < t_{tabel} (2,021)$  serta nilai taraf signifikansi sebesar  $0,820 > \alpha (0,05)$ . Artinya, jika ada peningkatan dalam kualitas analisa kredit maka tidak akan memberikan pengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Demikian sebaliknya, apabila ada penurunan kualitas analisa kredit maka tidak akan memberikan pengaruh secara parsial terhadap penurunan NPL BPR. Dengan demikian  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, atau dapat disimpulkan bahwa kualitas analisa kredit secara tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Hal ini berarti penyebab tinggi rendahnya suatu NPL bukan hanya faktor analisa kredit penyebabnya, tetapi ada faktor-faktor lainnya seperti karakter nasabah, faktor kondisi ekonomi, faktor politik pemerintahan dan lain sebagainya.
2. Kewenangan pemutus kredit berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Artinya, apabila ada peningkatan dalam pembatasan kewenangan pemutus kredit maka NPL BPR akan semakin menurun. Demikian sebaliknya, apabila tidak ada dorongan peningkatan pembatasan kewenangan pemutus kredit maka NPL BPR semakin ada peningkatan. Dalam memutuskan persetujuan kredit tidak boleh dilakukan oleh masing masing personal, tetapi harus melalui suatu komite (Komite Kredit). Dengan adanya komite kredit, setiap keputusan persetujuan atas permohonan kredit merupakan keputusan bersama dan obyektif, dimana masing-masing anggota komite kredit akan melakukan analisa kelayakan atas suatu permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah dan calon nasabah. Sehingga pemberian kredit benar-benar selektif. Hasil pengolahan data diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-2,851 < t_{tabel} (-2,021)$  serta nilai taraf signifikansi sebesar  $0,007 < \alpha (0,05)$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa variabel pembatasan kewenangan pemutus kredit berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Dalam rangka meningkatkan kualitas kredit yang diberikan serta menurunkan NPL, maka perlu adanya peningkatan dalam pembatasan kewenangan pemutus kredit. Setiap memberikan suatu keputusan pemberian kredit harus melalui komite kredit, dimana komite ini terdiri dari analis, Kepala Bagian Kredit, Direktur, Direktur Utama dan Komisaris. Dengan demikian keputusan pemberian kredit akan lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Status agunan berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Artinya, apabila ada peningkatan dalam pembatasan fluktuasi status agunan maka NPL BPR akan semakin menurun. Demikian sebaliknya, apabila tidak ada dorongan peningkatan fluktuasi status agunan maka NPL BPR semakin ada peningkatan. Hasil pengolahan data diperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $2,095 > t_{tabel} (2,021)$  serta nilai taraf signifikansi sebesar  $0,043 < \alpha (0,05)$ . Dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, atau dapat disimpulkan bahwa variabel fluktuasi status agunan berpengaruh secara parsial terhadap NPL BPR. Untuk menjaga agar NPL tidak tinggi salah satunya adalah dengan meningkatkan status agunan. Setiap agunan yang diberikan harus dilakukan pengikatan secara sempurna, dimana untuk jenis

sertifikat (tanah dan Bangunan) harus dipasang Hak Tanggungan sedangkan untuk kendaraan bermotor harus difiduciakan.

4. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara kualitas analisis kredit ( $X_{KAK}$ ), pembatasan kewenangan pemutus kredit ( $X_{PKPK}$ ), dan fluktuasi status agunan ( $X_{SA}$ ) secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPL BPR ( $Y_{NPL}$ ). Hal ini diketahui dari hasil pengolahan data, dimana diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar 6,652 sedangkan untuk nilai  $F_{tabel}$  dengan taraf signifikansi 5% diperoleh  $F_{tabel} = 2,840$ . Karena  $F_{hitung} (6,652) >$  dari  $F_{tabel} (2,840)$  dengan tingkat signifikansi atau probabilitas ( $\alpha$ )  $0,001 < 0,05$  adalah signifikan. artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti model regresi persamaan linier berganda  $Y_{NPL} = 35,135 + 0,111X_{KAK} - 1,999X_{PKPK} - 1,083X_{SA}$ , dapat dipergunakan untuk memprediksi variabel Y. Adapun besarnya varian yang terjadi pada variabel NPL BPR ( $Y_{BPR}$ ) adalah sebesar Koefisien Determinasi (KD)  $= R^2 = (0,597)^2 = 0,357 = 35,7\%$  dimana varian NPL BPR tersebut ditentukan oleh variabel kualitas analisis kredit ( $X_{KAK}$ ), pembatasan kewenangan pemutus kredit ( $X_{PKPK}$ ), dan fluktuasi status agunan ( $X_{SA}$ ). Sedangkan sisanya atau sebesar  $100\% - 35,7\% = 64,3\%$  itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

#### H. Daftar Pustaka

- Ali, Masyhud. (2006). Manajemen Risiko: Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Almilia, Luciana dan Winny Herdaningtyas. 2005. "Analisis Rasio CAMEL terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah pada Lembaga Perbankan periode 2000-2002". Jurnal Akutansi dan Keuangan, Vol.7, No.2, pp.131-147.
- Arthesa, Ade. Edia Handiman. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Cetakan ke dua. Jakarta: PT. Indeks.
- Bank-Bank di Indonesia," Media Riset Bisnis dan Manajemen, Vol.3, No.1, April, 2003, pp.59-74
- Budi Santoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Edisi 2. Salemba Empat, Jakarta.
- Dendawijaya, lukman. 2009. Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dahlan Siamat, 2005, "Manajemen Lembaga Keuangan" Kebijakan Moneter dan Perbankan, Kasmir. 2002. *Manajemen Perbankan*. Edisi 1, Cetakan ke-3. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Komang Darmawan, (2004), "Analisis Rasio-Rasio Bank," Info Bank, Juli, 18-21
- Hasibuan, Drs. H. Malayu. 2001. Dasar- Dasar Perbankan. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Kuncoro, Mudrajat. 2001. Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE.
- Munawir, S. 2001. *Analisa laporan keuangan*. Yogyakarta: Liberty
- Muchdarsyah, Sinungan. 2000. Manajemen Dana Bank. Edisi kedua. Jakarta: Bumi Aksara
- Riyadi Slamet. 2006. *Banking Assets and Liability Management*. Edisi Ketiga. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- .Pedoman Penyusunan Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat. Lampiran SE Ekstern No.12/15/DKBU/2010 Perihal Perubahan kedua atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/7/DPBPR Tanggal 23 Februari 2006 Perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/20/PBI/2006. Tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat`